



Original Article

Dinamika Identitas dan Relasi Kekuasaan dalam Masyarakat Multikultural

Neneng Julianah^{1✉}, St.Wardah Hanafie Das², Dadang Sumarna³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Pare-Pare, Indonesia

Korespondensi Email: nenengjulianah@gmail.com[✉]

Abstrak:

Masyarakat Indonesia sebagai bangsa multikultural menghadapi dinamika identitas sosial yang kompleks akibat perjumpaan beragam latar belakang suku, agama, budaya, dan bahasa. Dalam konteks tersebut, identitas tidak hanya berfungsi sebagai penanda sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan relasi kekuasaan yang membentuk hierarki pengakuan dan akses terhadap sumber daya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis dinamika identitas dan relasi kekuasaan dalam masyarakat multikultural melalui pendekatan studi literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR). Sumber data diperoleh dari artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang terbit dalam rentang waktu 2012–2025, yang ditelusuri melalui Google Scholar dan Garuda. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul dalam kajian sebelumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa identitas sosial bersifat dinamis dan dikonstruksi secara sosial melalui interaksi, wacana, serta praktik institusional. Relasi kekuasaan terbukti memainkan peran sentral dalam membentuk hierarki identitas melalui kebijakan publik, pendidikan, dan media. Pendidikan dan kebijakan negara berfungsi sebagai instrumen kekuasaan simbolik yang dapat mereproduksi atau justru mereduksi ketimpangan identitas. Selain itu, pendidikan multikultural dan kesadaran kritis terhadap wacana identitas dipandang sebagai strategi penting dalam mengelola keberagaman secara adil dan demokratis. Kajian ini menegaskan bahwa pengelolaan masyarakat multikultural memerlukan pendekatan kritis yang tidak hanya menekankan harmoni, tetapi juga keadilan sosial dan pengakuan setara terhadap seluruh identitas.

Kata kunci: Identitas Sosial, Relasi Kekuasaan, Masyarakat Multikultural.

Submitted	: 8 January 2026
Revised	: 14 January 2026
Acceptance	: 30 January 2026
Publish Online	: 31 January 2026

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang secara historis dan sosiologis dibangun di atas fondasi keberagaman. Lebih dari sekadar fakta demografis, kemajemukan ini mencakup perbedaan suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan sistem nilai yang hidup berdampingan dalam ruang sosial yang sama. Keberagaman tersebut menjadikan Indonesia sebagai masyarakat multikultural yang dinamis, namun juga rentan terhadap gesekan identitas. Identitas sosial tidak hanya berfungsi sebagai penanda siapa seseorang atau kelompok tertentu, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun relasi sosial. Dalam praktiknya, relasi ini sering kali tidak berlangsung setara karena dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan. Oleh sebab itu, memahami bagaimana identitas dikonstruksi dan dinegosiasikan dalam masyarakat multikultural menjadi langkah awal yang penting untuk menjaga harmoni sosial yang berkelanjutan.

Identitas dalam masyarakat multikultural bersifat cair dan terus mengalami proses pembentukan ulang melalui interaksi sosial. Seseorang tidak hanya membawa identitas personal, tetapi juga identitas kolektif yang dilekatkan oleh lingkungan sosial dan budaya. Tilaar (2012) menjelaskan bahwa pendidikan dan kebudayaan memainkan peran strategis dalam membentuk kesadaran identitas individu dan kelompok. Dalam ruang publik, identitas tidak hadir secara netral, melainkan diproduksi melalui bahasa, simbol, kebijakan, dan praktik sosial tertentu. Proses ini menyebabkan sebagian identitas memperoleh legitimasi, sementara identitas lain kurang mendapatkan pengakuan. Dengan demikian, identitas bukan sekadar persoalan siapa kita, melainkan juga bagaimana kita ditempatkan dalam struktur sosial yang lebih luas.

Dalam konteks sosial-politik, relasi kekuasaan menjadi faktor kunci yang menentukan arah pembentukan identitas. Kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh negara atau elit politik, tetapi juga bekerja melalui institusi pendidikan, media, dan budaya populer. Foucault dalam pembacaan Martono (2020) menegaskan bahwa kekuasaan bersifat produktif, artinya ia menciptakan pengetahuan, norma, dan kategori sosial. Melalui mekanisme ini, identitas tertentu dianggap wajar dan sah, sedangkan yang lain dipandang menyimpang atau kurang bernilai. Proses ini berlangsung secara halus dan sering tidak disadari oleh masyarakat. Akibatnya, relasi sosial yang terbentuk cenderung hierarkis dan berpotensi melanggengkan ketimpangan antar kelompok.

Relasi kekuasaan yang timpang dapat memunculkan berbagai bentuk marginalisasi, baik secara simbolik maupun struktural. Kelompok minoritas sering kali mengalami stereotip, diskriminasi, atau eksklusi dari akses sumber daya. Hidayat dan Nugroho (2019) menunjukkan bahwa dominasi budaya mayoritas berpengaruh besar terhadap cara kelompok lain dipersepsikan dan diperlakukan. Dalam masyarakat multikultural, ketimpangan ini dapat memicu konflik identitas apabila tidak dikelola secara bijak. Oleh karena itu, penting untuk melihat relasi kekuasaan bukan hanya sebagai persoalan politik formal, tetapi juga sebagai praktik sosial sehari-hari yang memengaruhi interaksi antarindividu dan antarkelompok.

Negara memiliki peran strategis dalam membentuk relasi identitas dan kekuasaan melalui kebijakan publik. Bahasa resmi, kurikulum pendidikan, dan simbol nasional merupakan contoh bagaimana negara memproduksi identitas kolektif. Suryana (2021) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan dapat menjadi alat reproduksi ketimpangan apabila tidak berpihak pada prinsip keadilan sosial. Di sisi lain, kebijakan yang sensitif terhadap keberagaman dapat menjadi sarana pemberdayaan kelompok minoritas. Dengan demikian, peran negara bersifat ambivalen: dapat memperkuat dominasi, tetapi juga berpotensi menciptakan ruang dialog dan kesetaraan jika

dirancang secara inklusif.

Pendidikan multikultural menjadi salah satu instrumen penting dalam merespons dinamika identitas dan relasi kekuasaan. Banks dalam penafsiran Mulyasa (2020) menekankan bahwa pendidikan multikultural tidak sekadar mengajarkan toleransi, tetapi juga membangun kesadaran kritis terhadap struktur sosial. Melalui pendidikan, peserta didik diajak memahami bahwa perbedaan adalah realitas yang harus dikelola secara adil. Pendidikan yang reflektif mampu menumbuhkan empati, dialog, dan kemampuan berpikir kritis terhadap ketimpangan. Dengan cara ini, relasi kekuasaan tidak lagi bersifat menindas, melainkan dapat diarahkan menjadi relasi yang memberdayakan.

Kajian tentang identitas dan kekuasaan dalam masyarakat multikultural semakin relevan di era globalisasi dan digitalisasi. Media sosial mempercepat pertukaran wacana identitas sekaligus membuka ruang konflik simbolik yang baru. Narasi tentang “kami” dan “mereka” semakin mudah tersebar dan memengaruhi persepsi publik. Hal ini menuntut adanya pendekatan akademik yang mampu membaca dinamika tersebut secara kritis. Penelitian berbasis literatur memberikan peluang untuk mensintesis berbagai temuan tentang bagaimana identitas dibentuk, dipertahankan, atau dipersoalkan dalam relasi kekuasaan kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian tentang dinamika identitas dan relasi kekuasaan menjadi sangat penting untuk memahami realitas masyarakat multikultural secara komprehensif. Identitas bukanlah sesuatu yang netral, melainkan selalu terhubung dengan struktur kekuasaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara sistematis literatur yang membahas hubungan antara identitas, kekuasaan, dan multikulturalisme. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan demokratis.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR) dengan tujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan penelitian yang relevan mengenai dinamika identitas dan relasi kekuasaan dalam masyarakat multikultural. Pendekatan SLR dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan kajian suatu topik melalui analisis kritis terhadap berbagai sumber ilmiah. Sumber data berasal dari artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang diterbitkan dalam rentang waktu 2012–2025. Rentang waktu ini dipilih untuk memastikan bahwa kajian yang dianalisis merepresentasikan perkembangan terbaru dalam studi multikulturalisme, identitas sosial, dan kekuasaan dalam konteks global maupun Indonesia.

Proses penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar dan Garuda dengan menggunakan kata kunci utama “identitas sosial”, “relasi kekuasaan”, dan “masyarakat multikultural”, baik dalam bahasa Indonesia maupun padanan bahasa Inggrisnya. Strategi pencarian dilakukan secara sistematis dengan mengombinasikan kata kunci menggunakan operator logika (AND, OR) untuk memperoleh artikel yang paling relevan. Hasil penelusuran awal kemudian dikumpulkan dan didokumentasikan dalam daftar referensi sementara. Selanjutnya dilakukan penyaringan berdasarkan kesesuaian judul dan abstrak dengan fokus penelitian, sehingga hanya artikel yang secara eksplisit membahas hubungan antara identitas dan kekuasaan dalam konteks

multikultural yang dilanjutkan ke tahap analisis penuh.

Tahap seleksi lanjutan dilakukan dengan membaca teks lengkap artikel yang telah lolos tahap awal. Artikel yang dipertahankan adalah yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu: (1) membahas identitas sosial atau budaya, (2) mengaitkannya dengan relasi kekuasaan, dominasi, atau hegemoni, dan (3) berada dalam kerangka masyarakat multikultural. Artikel yang bersifat deskriptif umum tanpa analisis relasi kekuasaan atau yang tidak relevan dengan konteks multikultural dikeluarkan dari kajian. Menurut Sugiyono (2022) pendekatan SLR memungkinkan peneliti membangun pemahaman konseptual yang kuat melalui sintesis temuan-temuan sebelumnya secara sistematis dan terstruktur.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, yaitu mengelompokkan hasil-hasil penelitian ke dalam tema-tema utama yang muncul secara berulang. Tema-tema tersebut meliputi konstruksi identitas sosial, dominasi budaya mayoritas, marginalisasi kelompok minoritas, serta peran pendidikan dan kebijakan publik dalam mengelola keberagaman. Setiap tema dianalisis secara kritis untuk melihat pola hubungan antara identitas dan kekuasaan. Hasil sintesis kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis yang bertujuan menjelaskan dinamika identitas dan relasi kekuasaan dalam masyarakat multikultural secara komprehensif dan mendalam.

Hasil Penelitian

Identitas Sosial Bersifat Dinamis dan Terkonstruksi Secara Sosial

Identitas sosial dalam masyarakat multikultural tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang tetap dan alamiah, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial yang terus berlangsung melalui interaksi. Individu membentuk pemaknaan tentang dirinya melalui hubungan dengan orang lain, institusi, dan wacana sosial yang dominan. Menurut Verkuyten (2018) identitas kelompok terbentuk dari proses kategorisasi sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman, sejarah, dan konteks kekuasaan. Dalam masyarakat multikultural, perjumpaan antaridentitas yang beragam menjadikan proses pembentukan identitas semakin kompleks dan dinamis. Identitas tidak hanya menjawab pertanyaan “siapa saya”, tetapi juga “bagaimana saya dilihat dan diperlakukan”. Oleh karena itu, identitas sosial harus dipahami sebagai proses yang selalu bergerak dan dapat berubah sesuai dengan situasi sosial yang melingkupinya.

Konstruksi identitas sangat terkait dengan konteks budaya dan sejarah sosial. Globalisasi, migrasi, dan perkembangan teknologi telah mempercepat pertemuan antarbudaya yang berbeda. Menurut Meer dan Modood (2019) identitas dalam masyarakat multikultural terbentuk melalui negosiasi antara nilai-nilai lama dan tuntutan sosial baru. Proses ini menunjukkan bahwa identitas bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi juga respons terhadap realitas kontemporer. Dalam praktiknya, kelompok tertentu sering memiliki posisi lebih dominan dalam mendefinisikan identitas yang dianggap “normal”. Sementara itu, kelompok minoritas harus menyesuaikan diri dengan kerangka makna yang telah mapan. Hal ini memperlihatkan bahwa identitas selalu berada dalam relasi dengan kekuasaan dan struktur sosial.

Relasi kekuasaan berperan penting dalam menentukan identitas mana yang memperoleh legitimasi sosial. Menurut Wodak (2021) wacana publik dan kebijakan sosial membentuk cara masyarakat memahami kelompok tertentu. Bahasa, simbol, dan narasi yang digunakan dalam ruang publik sering kali memuat kepentingan ideologis. Identitas yang selaras dengan kepentingan dominan cenderung dilegitimasi, sementara

identitas lain diposisikan sebagai “berbeda” atau “menyimpang”. Proses ini berlangsung secara halus dan sering tidak disadari. Dengan demikian, identitas sosial tidak hanya dibentuk oleh pilihan individu, tetapi juga oleh tekanan struktural yang berasal dari relasi kekuasaan yang timpang dalam masyarakat multikultural.

Media dan teknologi digital semakin mempercepat konstruksi identitas sosial. Media sosial menjadi ruang penting dalam pembentukan citra diri dan kelompok. Menurut Couldry dan Hepp (2017) praktik komunikasi digital membentuk realitas sosial baru yang memengaruhi cara individu memahami identitasnya. Representasi kelompok tertentu yang berulang-ulang dalam media dapat membentuk stereotip yang memengaruhi persepsi publik. Ketika stereotip ini diterima secara luas, ia menjadi bagian dari kesadaran kolektif. Individu kemudian menginternalisasi identitas yang dilekatkan padanya, meskipun identitas tersebut dibentuk oleh kekuatan eksternal. Hal ini memperkuat pandangan bahwa identitas sosial merupakan hasil konstruksi sosial yang terus direproduksi melalui wacana dan praktik komunikasi.

Pemahaman bahwa identitas bersifat dinamis dan terkonstruksi membuka ruang dialog antarbudaya yang lebih adil. Jika identitas dipahami sebagai hasil proses sosial, maka ia dapat dikritisi dan direkonstruksi. Pendidikan multikultural menjadi sarana strategis untuk membangun kesadaran kritis terhadap ketimpangan identitas. Menurut Gorski dan Dalton (2020), pendidikan harus membantu peserta didik mengenali bagaimana ketidakadilan sosial membentuk pengalaman identitas. Dengan kesadaran ini, masyarakat multikultural dapat mengelola perbedaan sebagai kekuatan kolektif, bukan sumber konflik. Identitas tidak lagi dipandang sebagai batas pemisah, tetapi sebagai hasil dialog yang terus berkembang dalam relasi sosial yang dinamis.

Relasi Kekuasaan Membentuk Hierarki Identitas

Relasi kekuasaan memiliki peran sentral dalam menentukan identitas mana yang dianggap dominan dan mana yang dipinggirkan dalam masyarakat multikultural. Kekuasaan tidak hanya hadir dalam bentuk kekuatan politik atau ekonomi, tetapi juga bekerja melalui bahasa, simbol, norma, dan kebijakan. Menurut Lukes (2021) kekuasaan memengaruhi cara individu dan kelompok memahami realitas sosial, termasuk bagaimana identitas diklasifikasikan dan dinilai. Dalam konteks ini, identitas yang sesuai dengan kepentingan kelompok dominan cenderung dianggap “normal” dan “bernilai”, sementara identitas lain diposisikan sebagai berbeda atau kurang sah. Proses ini membentuk hierarki sosial yang memengaruhi interaksi sehari-hari. Dengan demikian, relasi kekuasaan tidak hanya mengatur distribusi sumber daya, tetapi juga membentuk struktur makna dalam masyarakat.

Hierarki identitas terbentuk melalui praktik simbolik yang tampak netral, tetapi sebenarnya sarat kepentingan. Bahasa resmi, simbol nasional, dan wacana publik menjadi alat untuk memproduksi identitas kolektif yang dilegitimasi negara atau elit sosial. Menurut Mylonas (2019) negara sering menggunakan kebijakan identitas untuk memperkuat loyalitas politik dan stabilitas sosial. Namun, kebijakan tersebut juga dapat mengabaikan atau menekan identitas kelompok minoritas. Akibatnya, kelompok tertentu memperoleh pengakuan lebih besar, sementara yang lain berada pada posisi subordinat. Situasi ini menunjukkan bahwa hierarki identitas bukan terbentuk secara alamiah, melainkan melalui proses politik dan institusional yang sistematis.

Media dan ruang publik juga memainkan peran penting dalam membentuk hierarki identitas. Representasi kelompok tertentu secara berulang dapat

memperkuat stereotip dan memperlebar jarak sosial. Menurut van Dijk (2018) wacana media sering mereproduksi relasi kekuasaan dengan cara menampilkan kelompok dominan sebagai pusat norma sosial. Ketika narasi ini diterima tanpa kritik, masyarakat menginternalisasi pandangan tersebut sebagai kebenaran. Kelompok minoritas kemudian harus menegosiasikan identitasnya agar tidak terpinggirkan. Dengan demikian, media bukan hanya sarana informasi, tetapi juga arena politik simbolik yang membentuk hierarki identitas dalam masyarakat multikultural.

Hierarki identitas berdampak langsung pada akses terhadap sumber daya sosial, ekonomi, dan politik. Kelompok yang berada pada posisi dominan cenderung memiliki peluang lebih besar dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi publik. Menurut Fraser dan Jaeggi (2018), ketimpangan pengakuan (recognition) sering berjalan seiring dengan ketimpangan distribusi. Artinya, kelompok yang tidak diakui secara simbolik juga sering mengalami keterbatasan akses material. Dalam masyarakat multikultural, hal ini dapat memperdalam jurang sosial antar kelompok. Oleh karena itu, relasi kekuasaan harus dipahami sebagai faktor struktural yang memengaruhi baik identitas maupun kesejahteraan sosial.

Memahami relasi kekuasaan sebagai pembentuk hierarki identitas membuka ruang untuk kritik dan perubahan sosial. Jika hierarki tersebut merupakan hasil konstruksi sosial dan politik, maka ia dapat dipertanyakan dan direkonstruksi. Pendidikan multikultural dan kebijakan inklusif menjadi sarana penting untuk mereduksi dominasi simbolik. Menurut Yuval-Davis (2020) keadilan sosial dalam masyarakat multikultural menuntut pengakuan yang setara terhadap berbagai identitas. Dengan pendekatan ini, relasi kekuasaan tidak lagi digunakan untuk mempertahankan dominasi, tetapi untuk menciptakan ruang partisipasi yang adil bagi semua kelompok. Hierarki identitas dapat digantikan dengan relasi sosial yang lebih dialogis dan egaliter.

Kebijakan Publik dan Pendidikan sebagai Instrumen Kekuasaan Simbolik

Negara memainkan peran strategis dalam membentuk identitas kolektif melalui kebijakan publik, khususnya di bidang pendidikan. Pendidikan bukan hanya sarana transfer pengetahuan, tetapi juga wahana internalisasi nilai, norma, dan cara pandang tertentu tentang masyarakat. Menurut Apple (2019) kurikulum selalu merefleksikan kepentingan ideologis kelompok yang berkuasa, baik secara eksplisit maupun implisit. Melalui pilihan materi, bahasa pengantar, dan standar evaluasi, negara menentukan pengetahuan apa yang dianggap penting dan sah. Dalam masyarakat multikultural, keputusan tersebut sangat menentukan bagaimana identitas tertentu diakui atau diabaikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan tidak pernah netral, melainkan menjadi instrumen kekuasaan simbolik yang membentuk cara generasi muda memahami diri dan kelompok lain.

Kurikulum dan buku teks merupakan medium utama dalam mentransmisikan identitas kolektif versi negara. Konten sejarah, kewarganegaraan, dan budaya sering disusun dengan sudut pandang mayoritas. Menurut Sant et al. (2018) narasi dalam pendidikan kewarganegaraan kerap membingkai identitas nasional secara homogen, sehingga menyingkirkan pengalaman kelompok minoritas. Ketika narasi ini terus direproduksi, peserta didik belajar melihat identitas tertentu sebagai pusat dan yang lain sebagai pinggiran. Proses ini berlangsung secara halus, tetapi berdampak kuat terhadap cara pandang sosial. Oleh karena itu, kurikulum dan buku teks bukan

sekadar bahan ajar, melainkan arena politik simbolik yang membentuk hierarki identitas dalam masyarakat multikultural.

Bahasa pengantar dalam pendidikan juga berfungsi sebagai alat kekuasaan simbolik. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga penanda status sosial dan identitas. Menurut García dan Wei (2016) kebijakan bahasa dalam pendidikan sering memprioritaskan bahasa dominan dan meminggirkan bahasa lokal atau minoritas. Akibatnya, peserta didik dari latar belakang budaya tertentu harus menyesuaikan diri dengan norma linguistik yang tidak sepenuhnya mencerminkan identitas mereka. Hal ini dapat menimbulkan rasa keterasingan dan ketimpangan partisipasi. Dengan demikian, kebijakan bahasa dalam pendidikan turut membentuk siapa yang merasa “diakui” dan siapa yang merasa “asing” dalam ruang publik.

Ketika kebijakan pendidikan tidak dikelola secara inklusif, ia berpotensi mereproduksi ketimpangan identitas. Menurut Rizvi dan Lingard (2020) globalisasi pendidikan sering membawa standar universal yang mengabaikan konteks lokal dan keberagaman budaya. Hal ini membuat sekolah lebih fokus pada pencapaian akademik formal daripada pengakuan terhadap keragaman identitas peserta didik. Akibatnya, pendidikan justru memperkuat dominasi simbolik kelompok tertentu. Dalam masyarakat multikultural, kondisi ini dapat memperdalam jurang sosial dan memicu ketegangan identitas. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dipahami sebagai medan perjuangan antara nilai dominan dan aspirasi keberagaman.

Memahami pendidikan sebagai instrumen kekuasaan simbolik membuka ruang bagi reformasi kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Jika kurikulum, bahasa, dan praktik pembelajaran dirancang dengan perspektif multikultural, pendidikan dapat menjadi sarana pemberdayaan. Menurut Sleeter (2018) pendidikan yang responsif terhadap keragaman mampu menggeser relasi kekuasaan dari yang menindas menjadi dialogis. Dengan pendekatan ini, peserta didik tidak hanya belajar tentang perbedaan, tetapi juga belajar menghargai dan merayakannya. Kebijakan publik yang sensitif terhadap multikulturalisme akan membantu membangun masyarakat yang tidak hanya beragam, tetapi juga setara dalam pengakuan dan partisipasi.

Pendidikan Multikultural Berpotensi Mereduksi Ketegangan Identitas

Pendidikan multikultural dipandang sebagai pendekatan strategis dalam mereduksi ketegangan identitas di masyarakat yang beragam. Ketegangan identitas sering muncul ketika perbedaan dipahami sebagai ancaman, bukan sebagai realitas sosial yang wajar. Menurut Gay (2018) pendidikan yang responsif terhadap keberagaman mampu menciptakan lingkungan belajar yang menghargai perbedaan latar belakang budaya, bahasa, dan nilai. Dalam konteks ini, sekolah tidak hanya menjadi tempat transfer pengetahuan, tetapi juga ruang sosial untuk membangun sikap saling menghormati. Dengan memasukkan perspektif multikultural ke dalam kurikulum dan praktik pembelajaran, peserta didik diajak melihat identitas sebagai sesuatu yang setara dan saling melengkapi. Proses ini membantu mengurangi prasangka dan stereotip yang sering menjadi sumber konflik identitas.

Salah satu kekuatan utama pendidikan multikultural terletak pada pengembangan kesadaran kritis. Menurut Nieto dan Bode (2018) pendidikan multikultural harus mendorong peserta didik untuk memahami bagaimana ketimpangan sosial dan relasi kekuasaan membentuk pengalaman identitas. Dengan kesadaran ini, peserta didik tidak hanya menerima realitas sosial secara pasif, tetapi

mampu mengkritisnya. Mereka belajar bahwa perbedaan status sosial atau budaya bukanlah sesuatu yang alamiah, melainkan hasil konstruksi historis dan politis. Kesadaran kritis ini penting agar peserta didik tidak terjebak dalam logika “kami” dan “mereka”. Sebaliknya, mereka didorong untuk membangun solidaritas lintas identitas dalam kerangka keadilan sosial.

Pendidikan multikultural juga menekankan pentingnya empati dan dialog antarbudaya. Menurut Dervin (2016) dialog yang autentik memungkinkan individu memahami pengalaman hidup orang lain tanpa prasangka. Dalam proses pembelajaran, dialog ini dapat diwujudkan melalui diskusi reflektif, kerja kelompok lintas latar belakang, dan pembelajaran berbasis proyek sosial. Ketika peserta didik diberi ruang untuk berbagi cerita dan perspektif, mereka belajar melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Proses ini tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap empatik. Empati menjadi kunci dalam mereduksi ketegangan identitas karena memungkinkan individu merespons perbedaan dengan pengertian, bukan kecurigaan atau penolakan.

Nilai keadilan sosial merupakan fondasi penting dalam pendidikan multikultural. Menurut Cochran-Smith et al. (2016) pendidikan yang berorientasi pada keadilan sosial bertujuan membekali peserta didik dengan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menantang ketidakadilan. Dalam konteks masyarakat multikultural, pendekatan ini membantu peserta didik memahami bahwa konflik identitas sering berakar pada ketimpangan struktural. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfokus pada harmoni semu, tetapi juga pada transformasi sosial. Peserta didik didorong untuk menjadi agen perubahan yang mampu memperjuangkan kesetaraan dan pengakuan bagi semua identitas. Pendekatan ini menggeser relasi kekuasaan dari yang dominatif menjadi partisipatif dan dialogis.

Dengan demikian, pendidikan multikultural memiliki potensi besar dalam mereduksi ketegangan identitas jika diterapkan secara konsisten dan reflektif. Ketika sekolah menjadi ruang yang aman bagi keberagaman, peserta didik dapat tumbuh sebagai individu yang terbuka dan inklusif. Menurut Gorski (2020) pendidikan multikultural yang kritis tidak hanya mengajarkan toleransi, tetapi juga membangun komitmen terhadap keadilan sosial. Dalam masyarakat multikultural, pendekatan ini membantu mengelola perbedaan secara konstruktif. Pendidikan tidak lagi sekadar mereproduksi struktur sosial yang timpang, tetapi menjadi sarana pemberdayaan yang memungkinkan relasi antaridentitas dibangun atas dasar kesetaraan, dialog, dan saling menghargai.

Pentingnya Kesadaran Kritis terhadap Wacana Identitas

Kesadaran kritis terhadap wacana identitas menjadi kunci dalam memahami bagaimana identitas sosial dibentuk, disebarkan, dan dilegitimasi dalam masyarakat multikultural. Identitas tidak hadir secara alamiah, melainkan diproduksi melalui bahasa, simbol, media, dan kebijakan. Menurut Fairclough (2018) wacana memiliki kekuatan ideologis karena mampu membingkai realitas sosial dan menentukan apa yang dianggap “normal” atau “menyimpang.” Dalam konteks ini, narasi tentang identitas nasional, etnis, atau budaya sering disederhanakan menjadi gambaran tunggal yang menguntungkan kelompok dominan. Tanpa kesadaran kritis, individu cenderung menerima narasi tersebut sebagai kebenaran objektif. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa identitas selalu merupakan hasil konstruksi sosial yang sarat kepentingan.

Media massa dan media digital memainkan peran besar dalam membentuk wacana identitas. Menurut Couldry dan Hepp (2017) media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara publik memahami diri dan orang lain. Representasi kelompok tertentu yang stereotipikal atau bias dapat memperkuat ketimpangan identitas. Kesadaran kritis memungkinkan masyarakat membaca media secara reflektif, bukan konsumtif. Individu diajak untuk bertanya: siapa yang berbicara, untuk kepentingan siapa, dan suara siapa yang disenyapkan. Dengan kemampuan literasi media yang kritis, masyarakat dapat menolak narasi yang merendahkan kelompok tertentu. Proses ini penting agar media tidak menjadi alat reproduksi ketidakadilan simbolik dalam masyarakat multikultural.

Dalam bidang pendidikan, kesadaran kritis terhadap wacana identitas sangat berkaitan dengan kurikulum dan praktik pembelajaran. Menurut Apple (2019) kurikulum tidak pernah netral karena selalu mencerminkan pilihan ideologis tentang pengetahuan apa yang dianggap penting. Jika kurikulum hanya menampilkan satu versi sejarah atau budaya, maka identitas lain menjadi terpinggirkan. Pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kritis mendorong peserta didik untuk menganalisis teks, narasi sejarah, dan simbol nasional secara reflektif. Mereka tidak hanya menghafal, tetapi juga menilai dan mempertanyakan. Dengan demikian, sekolah menjadi ruang untuk membangun subjek yang sadar, bukan sekadar patuh terhadap wacana dominan.

Kesadaran kritis juga penting dalam membaca kebijakan publik yang berkaitan dengan identitas dan kebudayaan. Menurut Bacchi (2016) setiap kebijakan selalu mengandung asumsi tentang “masalah” dan “solusi” yang merefleksikan sudut pandang tertentu. Dalam masyarakat multikultural, kebijakan sering mendefinisikan identitas tertentu sebagai standar, sementara yang lain dianggap “berbeda” atau “perlu disesuaikan.” Dengan kesadaran kritis, masyarakat dapat menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar inklusif atau justru menormalisasi ketimpangan. Sikap kritis ini mendorong partisipasi publik dalam mengawal kebijakan agar lebih adil dan responsif terhadap keberagaman identitas.

Dengan demikian, kesadaran kritis terhadap wacana identitas merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat multikultural yang demokratis dan inklusif. Menurut Giroux (2020) warga yang kritis tidak hanya mampu membaca dunia, tetapi juga berani mengubahnya. Kesadaran kritis memungkinkan individu dan kelompok menantang narasi yang menindas serta membuka ruang bagi suara yang selama ini terpinggirkan. Dalam masyarakat yang beragam, kemampuan ini menjadi penyangga utama terhadap konflik identitas. Ketika warga mampu berpikir reflektif, dialog antaridentitas dapat berlangsung secara setara. Dengan begitu, keberagaman tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan sosial yang memperkaya kehidupan bersama.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa identitas dalam masyarakat multikultural merupakan konstruksi sosial yang dinamis dan selalu berada dalam relasi dengan kekuasaan. Kekuasaan bekerja tidak hanya melalui struktur politik formal, tetapi juga melalui wacana, kebijakan publik, pendidikan, dan media yang membentuk hierarki identitas serta pola pengakuan sosial. Ketimpangan identitas muncul ketika identitas tertentu dilegitimasi sebagai norma dominan, sementara identitas lain dipinggirkan secara simbolik maupun struktural. Pendidikan dan

kebijakan publik memiliki peran ambivalen, yakni dapat mereproduksi ketimpangan atau menjadi sarana transformasi sosial apabila dikelola secara inklusif. Pendidikan multikultural dan penguatan kesadaran kritis terhadap wacana identitas menjadi kunci dalam mereduksi ketegangan identitas serta membangun relasi sosial yang lebih adil, dialogis, dan demokratis dalam masyarakat multikultural.

Saran

Diperlukan penguatan kebijakan pendidikan dan praktik pembelajaran berbasis multikultural yang berorientasi pada keadilan sosial dan pengembangan kesadaran kritis, agar sekolah dan institusi publik tidak hanya menjadi ruang reproduksi identitas dominan, tetapi juga menjadi arena dialog yang mengakui dan memberdayakan keberagaman identitas dalam masyarakat multikultural.

Daftar Pustaka

- Apple, M. W. (2019). *Ideology and curriculum* (4th ed.). Routledge.
- Bacchi, C. (2016). *The politics of problem representation*. Palgrave Macmillan.
- Banks, J. A. (2016). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching* (6th ed.). Routledge.
- Cochran-Smith, M., Villegas, A. M., Abrams, L., Chávez-Moreno, L., Mills, T., & Stern, R. (2016). Research on teacher preparation: Charting the landscape of a sprawling field. *Journal of Teacher Education*, 66(5), 439–456. <https://doi.org/10.1177/0022487116660154>
- Couldry, N., & Hepp, A. (2017). *The mediated construction of reality*. Polity Press.
- Dervin, F. (2016). *Interculturality in education: A theoretical and methodological toolbox*. Palgrave Macmillan.
- Fairclough, N. (2018). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (3rd ed.). Routledge.
- Fraser, N., & Jaeggi, R. (2018). *Capitalism: A conversation in critical theory*. Polity Press.
- García, O., & Wei, L. (2016). *Translanguaging: Language, bilingualism and education*. Palgrave Macmillan.
- Gay, G. (2018). *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice* (3rd ed.). Teachers College Press.
- Giroux, H. A. (2020). *On critical pedagogy* (2nd ed.). Bloomsbury.
- Gorski, P. C. (2020). Equity literacy for all. *Educational Leadership*, 77(7), 24–30.
- Gorski, P. C., & Dalton, J. (2020). Dismantling the “achievement gap”: Toward a structural analysis of educational equity. *Multicultural Perspectives*, 22(2), 75–82. <https://doi.org/10.1080/15210960.2020.1740065>
- Hidayat, D., & Nugroho, R. (2019). Identitas, kekuasaan, dan multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 145–160.
- Lukes, S. (2021). *Power: A radical view* (3rd ed.). Bloomsbury Academic.
- Martono, N. (2020). *Sosiologi perubahan sosial: Perspektif klasik, modern, dan postmodern*. RajaGrafindo Persada.
- Meer, N., & Modood, T. (2019). *Multiculturalism* (3rd ed.). Polity Press.
- Mulyasa, E. (2020). *Pendidikan multikultural: Konsep, prinsip, dan implementasi*. Remaja Rosdakarya.
- Mylonas, H. (2019). *The politics of nation-building: Making co-nationals, refugees, and minorities*. Cambridge University Press.
- Nieto, S., & Bode, P. (2018). *Affirming diversity: The sociopolitical context of*

- multicultural education (7th ed.). Pearson.
- Rizvi, F., & Lingard, B. (2020). *Globalizing education policy* (2nd ed.). Routledge.
- Sant, E., Davies, I., Pashby, K., & Shultz, L. (2018). Global citizenship education: A critical introduction to key concepts and debates. *International Journal of Development Education and Global Learning*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.18546/IJDEGL.10.1.01>
- Sleeter, C. E. (2018). Multicultural education past, present, and future: Struggles for dialog and power-sharing. *International Journal of Multicultural Education*, 20(1), 1–16. <https://doi.org/10.18251/ijme.v20i1.1663>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryana, Y. (2021). Kebijakan pendidikan dan reproduksi ketimpangan sosial. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(1), 33–48.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Grasindo.
- van Dijk, T. A. (2018). *Discourse and power* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Verkuyten, M. (2018). *The social psychology of ethnic identity* (2nd ed.). Routledge.
- Wodak, R. (2021). *The politics of fear: What right-wing populist discourses mean* (2nd ed.). Sage.
- Yuval-Davis, N. (2020). *Bordering*. Polity Press.